



=====
**Analisis Perbedaan Dalam Pemanfaat Pembebasan PPN Terhadap
Profitabilitas Pada Perusahaan Pelayaran PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Tahun 2010**

**Oleh:
Ruslaini
Sulistiani**

ABSTRACT

Liquidity is the company's ability to pay on time and how quickly the company disburses its assets (accounts receivable and inventory) into cash. profitability is the company's ability to generate a profit and support growth in both the short and long term. The company's profitability is usually seen from the company's income statement (income statement) which shows the company's performance report. In relation to company profitability, entrepreneurs need to pay attention to the benefits of VAT exemption as stipulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) No.28/2006 to maintain company liquidity which will be reflected in the Cash Flow Statement.

Analysis of the Utilization of VAT Exemption on Fixed Assets ownership of ships begins by analyzing the applicable laws and regulations related to the imposition and exemption of VAT, observing the procedures for obtaining VAT exemptions, analyzing the Cash Flow Statement as an indicator of liquidity, analyzing the current year balance sheet as an indicator. liquidity as well as analyzing the Profit and Loss for the current year as an indicator of Profitability and analyzing these reports on the exemption facility with SKB and VAT Restitution facility on the acquisition of fixed assets of the ship so that in the end it will be known how the management should respond to the VAT exemption facility for ownership of fixed assets of the ship.

Keywords: VAT, Profitability, Shipping Company

ABSTRAK

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tepat waktu dan seberapa cepat perusahaan mencairkan aktivasnya (piutang usaha dan persediaan) ke dalam uang tunai. profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (*income statement*) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Hubungannya dengan Profitabilitas perusahaan maka Pengusaha perlu memperhatikan manfaat pembebasan PPN seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2006 untuk menjaga likuiditas perusahaan yang akan tercermin dalam Laporan Arus Kas.

Analisis Pemanfaatan Pembebasan PPN atas kepemilikan Aktiva Tetap kapal dimulai dengan menganalisis Undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan pengenaan dan pembebasan PPN, mencermati tata cara perolehan pembebasan PPN, menganalisis Laporan Arus Kas sebagai indikator likuiditas, menganalisis neraca tahun berjalan sebagai indikator likuiditas serta menganalisis Laba Rugi tahun berjalan sebagai indikator Profitabilitas serta menganalisis laporan-laporan tersebut terhadap fasilitas pembebasan dengan SKB dan fasilitas Restitusi PPN atas perolehan Aktiva Tetap Kapal sehingga pada akhirnya akan diketahui bagaimana sebaiknya pihak manajemen menyikapi fasilitas pembebasan PPN atas kepemilikan aktiva tetap kapal.

Kata Kunci: PPN, Profitabilitas, Perusahaan Pelayaran



Latar Belakang

Seiring dengan usaha pengembangan Transportasi Laut di Indonesia, Pemerintah memberikan banyak dukungan kepada Pengusaha untuk menarik minat Pengusaha menjalankan usaha angkutan laut demi memenuhi asas *Cabotage* yang mewajibkan distribusi barang di dalam negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia. Lambatnya perkembangan Perusahaan Pelayaran melatar belakangi lahirnya pemberlakuan asas *Cabotage* atau satu tujuan pelabuhan bagi kapal asing. Kebijakan *Cabotage* oleh Pemerintah mulai diimplementasikan akhir Maret 2005 merupakan kebijakan dalam membatasi ruang gerak Perusahaan Pelayaran asing. Kebijakan ini dalam rangka mendukung Perusahaan Pelayaran nasional agar dapat menguasai pasar domestik. Penerapan asas *Cabotage* sebagai upaya untuk membentengi diri sekaligus menjamin kelangsungan bisnis masing-masing Pelayaran di setiap Negara. Asas *Cabotage* berkaitan erat dengan konsep pelabuhan *huband spoke* (Pengumpul dan pengumpan). Pelabuhan pengumpul, yang berfungsi sebagai pelabuhan internasional, cukup misalnya dibatasi di Tanjung Priok, Belawan, Makasar, Bitung, Tanjung Perak, Tanjung Emas. Sisa pelabuhan cukup menjadi pelabuhan domestik sebagai pengumpan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: “Bagaimana tingkat Likuiditas dalam hubungannya terhadap Profitabilitas Perusahaan untuk menentukan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN”

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana tata cara perlakuan pembebasan PPN serta bagaimana manfaatnya terhadap arus kas sebagai indikator likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan Pelayaran yang mendapat pembebasan atas PPN kepemilikan Kapal. Sehingga pada akhirnya hasil analisis dari penelitian dapat digunakan untuk menentukan fasilitas pembebasan PPN yang mungkin dipilih oleh Perusahaan di bidang Pelayaran.

Landasan Teori

Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan Pelayaran Nasional (Perusahaan Angkutan Laut Nasional) adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia (*Indonesian National Shipping Company*) yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Perusahaan angkutan laut nasional dapat berupa badan hukum yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia maupun dalam bentuk kerjasama dengan asing (*PMA/joint venture*) asalkan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut khususnya dalam Pasal 20 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang PPN terbaru saat ini yaitu UU No. 42 Tahun 2009 ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan diundangkan tanggal 15 Oktober 2009 dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM ini secara resmi diberlakukan sejak 1 April 2010.



Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tersebut kemudian diperbarui yang pertama kalinya pada Tahun 1994 dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagai berikut :

Perubahan kedua dilakukan pada Tahun 2000 dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dengan pokok-pokok perubahan pada beberapa ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diubah antara lain sebagai berikut :

Arus Kas, Likuiditas dan Hubungannya Terhadap Profitabilitas

Pengertian Arus Kas

Arus Kas (*Cash Flow*) adalah sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas Perusahaan dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam Perusahaan dan aliran kas keluar Perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.

Hal utama yang perlu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana/uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara sederhana fungsi tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:

1. fungsi likuiditas, yaitudana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu relatif singkat tanpa ada pengurangan investasi awal
2. fungsi anti inflasi, yaitu dana yang disimpan guna menghindari risiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat.
3. *Capital growth*, adalah dana yang diperuntukkan untuk penambahan/ perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang.

Hubungan Likuiditas Terhadap Profitabilitas

Dalam bukunya, Arthur J. Keown menyatakan Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tepat waktu dan seberapa cepat perusahaan mencairkan aktivitya (piutang usaha dan persediaan)ke dalam uang tunai

Pada situs Wikipedia dijelaskan Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar .

Untuk mengukur likuiditas, dapat digunakan dua pendekatan sebagai berikut

1. Membandingkan kas dan aktiva – aktiva yang dapat diubah dalam bentuk kas pada tahun dimana kewajiban jatuh tempo dan akan dibayar pada tahun itu juga.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

2. Mempelajari kemampuan perusahaan untuk mengubah piutang usaha dan persediaan menjadi kas dalam suatu periode waktu tertentu.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Penjualan Kredit Harian}}$$

Dalam situs Wikipedia juga dijelaskan yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat



dari laporan laba rugi perseroan (*income statement*) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan.

Profitabilitas mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Perbandingan yang digunakan dalam menghitung profitabilitas adalah :

1. Profitabilitas = $\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan total}}$
2. Profitabilitas = $\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Aset total}}$

Pengaruh Pembebasan PPN Terhadap Arus Kas (*Cash Flow*)

Menurut Agung firmansyah dalam karya berjudul “Analisis Aspek Pajak” dijelaskan beberapa implikasi kebijakan fasilitas PPN bagi Perusahaan Pelayaran diantaranya :

1. Kondisi dana arus perusahaan dalam periode berjalan akan berpengaruh terhadap keluarnya sejumlah uang untuk pembayaran PPN.
2. Pengenaan PPN pada pengadaan kapal laut sedikitnya akan menambah risiko beban pada kredit pajak.
3. Operasional berkaitan dengan pungutan, setoran dan laporan PPN lebih ringan sehingga mempermudah pekerjaan administrasi perusahaan.

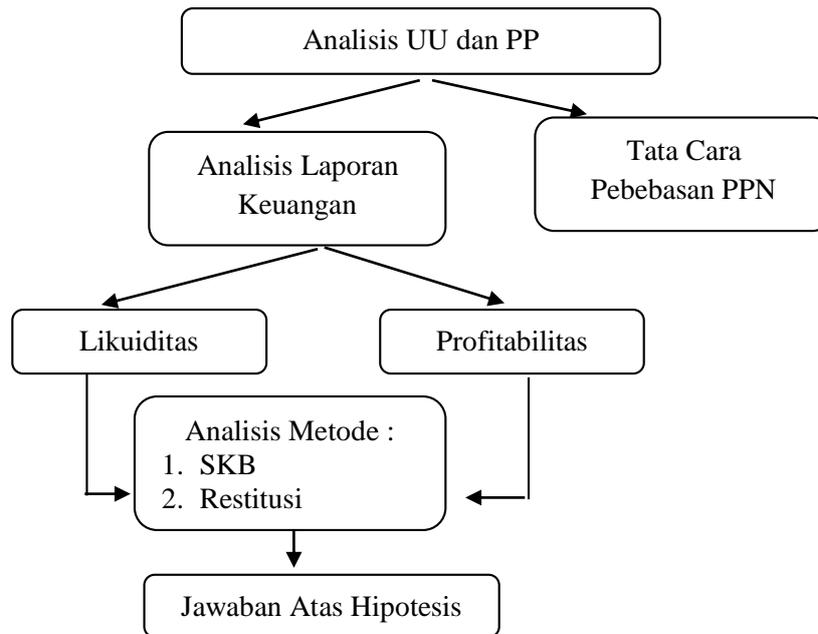
Dalam karya tersebut disimpulkan implikasi perbedaan perlakuan pengenaan PPN bagi Perusahaan Pelayaran nasional adalah likuiditas perusahaan dalam jangka pendek menjadi agak terganggu sehingga sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan akibat pelemahan daya saing dengan Perusahaan Pelayaran asing. Kondisi arus dana pada periode berjalan akan terpengaruh dengan adanya pembayaran PPN pada bulan tersebut.

Perusahaan tidak hanya fokus terhadap biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan tapi juga harus memperhitungkan adanya pembebanan pajak tambahan ini. Hal ini terjadi karena perusahaan harus menyisihkan uang untuk pembayaran PPN untuk pengadaan kapal laut.

Kerangka Pikir Dan Metodologi Penelitian

Kerangka Pikir

Dalam hubungannya dengan Profitabilitas perusahaan maka Pengusaha perlu memperhatikan manfaat pembebasan PPN seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2006 untuk menjaga likuiditas perusahaan yang akan tercermin dalam Laporan Arus Kas. Dengan analisis ini akan diketahui bagaimana manfaat fasilitas pembebasan PPN terhadap Likuiditas perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Profitabilitas perusahaan. Setelah itu, manajemen diharapkan dapat menyikapi adanya fasilitas pembebasan PPN tersebut dengan baik. Analisis Pemanfaatan Pembebasan PPN atas kepemilikan Aktiva Tetap kapal dimulai dengan menganalisis Undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan pengenaan dan pembebasan PPN, mencermati tata cara perolehan pembebasan PPN, menganalisis Laporan Arus Kas sebagai indikator likuiditas, menganalisis neraca tahun berjalan sebagai indikator likuiditas serta menganalisis Laba Rugi tahun berjalan sebagai indikator Profitabilitas serta menganalisis laporan-laporan tersebut terhadap fasilitas pembebasan dengan SKB dan fasilitas Restitusi PPN atas perolehan Aktiva Tetap Kapal sehingga pada akhirnya akan diketahui bagaimana sebaiknya pihak manajemen menyikapi fasilitas pembebasan PPN atas kepemilikan aktiva tetap kapal.



Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori dan kerangka pikir diatas, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. H_{01} = Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB terhadap likuiditas di PT. Pelayaran Temas line, Tbk
 H_{a1} = Terdapat perbedaan secara signifikan antara menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB terhadap likuiditas di PT. Pelayaran Temas line, Tbk
2. H_{02} = Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB terhadap profitabilitas di PT. Pelayaran Temas line, Tbk
 H_{a2} = Terdapat perbedaan secara signifikan antara menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB terhadap profitabilitas di PT. Pelayaran Temas line, Tbk

Variabel-Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas atau *independent variable* (x) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki pengaruhnya. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Likuiditas fasilitas yang dapat diperoleh oleh Pengusaha di bidang Pelayaran terkait dengan PPN yaitu :

- a. Pembebasan PPN dengan SKB
- b. Restitusi Pajak



2. Variabel Terikat

Variabel terikat atau *dependent variable* (y) adalah variabel yang timbul sebagai pengaruh dari variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat (y) adalah Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang

Alat Analisis Yang Digunakan

Alat - alat yang digunakan dalam analisis antara lain :

1. Analisis kebijakan yang terdiri atas :
 - a. Undang-Undang PPN
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI.
 - e. Surat Edaran Pemerintah terkait PPN.
2. Laporan Arus Kas sebagai indikator Likuiditas

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi dan sampel menggunakan metode partisipatori pada perusahaan. Prinsip yang mendasari pendekatan partisipatori menurut Suharyanto (1998) adalah pertukaran informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, efektivitas, efisiensi, pemberdayaan dan keseimbangan. Populasi yang diambil adalah Laporan Keuangan PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dengan sampel penelitian Laporan arus kas, Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2010.

Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data kuantitatif, yaitu dengan mengambil dari sumber media publikasi laporan keuangan perusahaan terbuka. Sedangkan data kualitatif, seperti gambaran umum perusahaan atau sejarah perusahaan hanya digunakan sebagai pelengkap. Sumber data berasal dari media publikasi laporan keuangan perusahaan terbuka.

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data teoritis guna menunjang pembahasan masalah dan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data dengan terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian terhadap obyek penelitian. Dalam studi lapangan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, guna mendapatkan data-data yang diperlukan, antara lain :

- Undang –undang yang mengatur PPN
- Perturan peraturng megatur PPN



- Laporan Keuangan PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yang menggambarkan Arus Kas Perusahaan pada saat perolehan Aktiva tetap Kapal.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan memfotokopi struktur organisasi, mengutip atau memperoleh dari catatan atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian, yaitu :

- Undang-undang yang mengatur PPN
- Peraturan peraturan yang mengatur PPN
- Laporan Keuangan PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yang menggambarkan Arus Kas Perusahaan pada saat perolehan Aktiva tetap Kapal.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan lain artinya, periset adalah tangan kedua yang sekedar mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.

Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Profile Perusahaan

1. Pendirian PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk

PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk didirikan dengan nama PT Tempuran Emas berdasarkan Akta No. 252 tanggal 17 September 1987 dari notaris Misahardi Wilamarta, S.H, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 350 Tanggal 18 November 1987 dari Notaris yang sama. Akta Notaris dan perubahannya telah disahkan oleh Mneteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1656.HT.01.04.TH.98 tanggal 19 Maret 1988. Perubahan nama perusahaan Menjadi PT. Pelayaran Tempuran Emas dilakukan berdasarkan Akta Notaris Wishardi Wishamarta, S.H No. 28 Tanggal 5 Februari 1997 yang telah mendapatkan persetujuan Mentrian Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-1656.HT.01.04.TH.98 Tanggal 19 Maret 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6347 Tanggal 13 November 1998. Kantor Pusat PT Tempuran Emas terletak di Jalan Tembang No. 51 Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan kantor cabang di Surabaya, Makasar, Bitung, Pontianak, Pekan Baru, Ambon, Sorong dan Jayapura, Perusahaan memulai kegiatan komersil pada tahun 1998.

2. Susunan Direksi PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk

Susunan DewanKomisaris dan Direksi PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Wong Chau Lin
Komisaris Independen	Susan Gazali
	Robert Hasiholan Sianipar

Direksi

Direktur Utama	Harto Khusumo
Direktur	Sutikno Khusumo
Direktur	John Wisnu Ali
Direktur	Pieter Adamy Setyo
Direktur	Ferdy Suwandi



Pengolahan Data

PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk sebagai perusahaan terbuka setiap tiga bulan mengeluarkan laporan keuangan yang dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang merupakan cermin bagi pihak luar untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan.

Laporan Arus Kas

Dalam Laporan Arus Kas PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yang berakhir Tanggal 31 Desember 2010 diatas, saldo kas dan setara kas perusahaan senilai Rp. 7.019.313.499,-. Dalam laporan arus kas tersebut tidak terdapat pembayaran PPN atas perolehan aktiva tetap Kapal senilai Rp. 69.065.700.100,-. Jika PT. Tempuran Emas, Tbk memilih fasilitas Restitusi dan membayarkan PPN 10% pada saat perolehan Aktiva tetap Kapal.

Dengan adanya pembayaran PPN atas perolehan aktiva tetap kapal sebesar 10% dari nilai aktiva yaitu Rp. 6.906.570.010,- maka Kas dan setara kas PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk menjadi Rp. 112.743.489,-. Perbedaan kas dan setara kas pada Tabel 4.1 dan 4.2 dapat diketahui menggunakan SPSS Uji Beda sebagai berikut :

Tabel 4.3 One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KAS	2	3.57E9	4.884E9	3.453E9

Tabel 4.4 One-Sample Test

	Test Value = 0					
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
KAS	1.033	1	0.490	3.566E9	-4.03E10	4.74E10

Dari hasil uji beda tersebut dapat diketahui nilai signifikansi perbedaan arus kas tersebut adalah 0,490 dengan *Confidence level* 0,05. Artinya adalah $H_0 > H_a$ maka H_0 diterima. Jika dilihat dari T hitung yang diperoleh dari uji beda tersebut adalah 1,033, dengan *Confidence Level* 0,05 maka T table nya adalah 6,314. T Table diketahui lebih besar dari T-hitung atau $H_0 < H_a$ maka H_0 diterima artinya bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada arus kas perusahaan pada saat perusahaan menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan pada saat perusahaan tidak menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.

Neraca Perusahaan

Dalam Neraca PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 terdapat kenaikan Aset Tetap Kapal senilai Rp. 69.065.700.100,-. Atas laporan Neraca tersebut, maka dapat dihitung Rasio Likuiditas (Rasio Lancar) PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk Untuk Laporan yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 sebagai Berikut :



$$\begin{aligned} \text{Rasio Lancar} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \\ &= \frac{202.021.836.689}{420.647.145.431} \\ &= 0,48 \end{aligned}$$

Artinya bahwa PT . Pelayaran Tempuran Emas, Tbk mempunyai aktiva lancar sebesar Rp. 0,48,- untuk menjamin pembayaran setiap Rp. 1,- hutang lancar atau kemampuan untuk membayar hutang lancar sebesar 48%. Hal tersebut dapat diartikan juga bahwa perusahaan dalam kondisi tidak likuid karena perusahaan tidak mampu membayar penuh setiap Rp. 1,- hutangnya melainkan hanya mampu membayar sebanyak 48% saja dari setiap Rp. 1,- hutangnya.

Apabila PT. Tempuran Emas, Tbk membayar PPN atas perolehan Aktiva Kapal, maka Neraca PT. Tempuran Emas, Tbk yang berakhir 31 Desember 2010 menjadi sebagai berikut :

Akibat pembayaran PPN sebesar 10% atau senilai Rp. 6.906.570.010,- apabila PPN dibayarkan, Kas dan setara Kas menjadi Rp. 112.743.489,- Rasio likuiditas PTPelayaran Tempuran Emas Tbk berubah menjadi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Lancar} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \\ &= \frac{195.115.266.679}{420.647.145.431} \\ &= 0,46 \end{aligned}$$

Artinya PT . Pelayaran Tempuran Emas Tbk mempunyai aktiva lancar sebesar Rp. 0,46,- untuk menjamin pembayaran setiap Rp. 1,- hutang lancar atau kemampuan untuk membayar hutang lancar sebesar 46%. Atau dengan kata lain, perusahaan dalam kondisi tidak likuid karena perusahaan tidak mampu membayar penuh setiap Rp. 1,- hutangnya melainkan hanya mampu membayar sebanyak 46% saja dari setiap hutang Rp. 1,-

Signifikansi atas perbedaan Likuiditas saat PT. Tempuran Emas Tbk memanfaatkan SKB PPN sehingga tidak membayar PPN dan pada saat PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk memilih membayar PPN dan merestitusi kemudian dapat dilihat dengan uji beda menggunakan SPSS Sebagai berikut :

Tabel 4.7 One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Likuiditas	2	.4700	.01414	.01000

Tabel 4.8 One-Sample Test

	Test Value = 0					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Likuiditas	47.000	1	.014	.47000	.3429	.5971

Dilihat dari hasil penghitungan SPSS diatas, dapat diketahui signifikansinya adalah 0.014 dengan *Confidence level* 0,05 maka dapat diartikan bahwa $H_0 < H_a$ maka H_0 ditolak, atau jika dilihat dari nilai T pada hasil uji SPSS yaitu 0,47 dengan *confidence level* 5% maka dapat



diketahui nilai T Table nya adalah 6,314 atau $H_0 > H_a$ sehingga H_0 ditolak artinya bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada saat perusahaan menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan pada saat perusahaan tidak menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.

Laporan Laba Rugi

Atas laporan Laba/Rugi PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk yang tidak dipublikasikan untuk umum diketahui PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 114.457.408.508,-. Maka dapat diketahui rasio profitabilitas PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk untuk laporan yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Profitabilitas} &= \frac{\text{labu bersih setelah pajak}}{\text{aset total}} \\ &= \frac{-114.457.408.508}{1.287.714.020.323} \\ &= -8.89\% \end{aligned}$$

Artinya bahwa Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto setiap Rupiah Modal sendiri tidak mampu menghasilkan laba melainkan merugi sampai dengan -Rp. 8.89,-

Karena harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar, termasuk dalam harga perolehan harta adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan harta tersebut seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan pemasangan maka dalam perolehan aset tetap, PPN yang dibayarkan tidak akan mempengaruhi Laporan Laba Rugi tahun berjalan sehingga tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Analisis Dan Pembahasan

Analisis

1. Arus Kas Penentu Fasilitas PPN

Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi (*operating*), investasi (*investing*) maupun pendanaan (*financing*) selama periode akuntansi. Dengan demikian, laporan arus kas juga menunjukkan efek aktivitas investasi dan pendanaan. Jika digunakan dalam kaitan dengan Laporan keuangan lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mengetahui jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Perusahaan harus mampu menganalisis dan memprediksi arus kas mendatang karena rasio likuiditas biasanya dapat memburuk pada akhir tahun. Selain itu, memburuknya kondisi likuiditas perusahaan dapat terjadi jika pengeluaran kas lebih besar daripada pemasukannya. Oleh sebab itu, penulis memandang perlu menganalisis laporan arus kas perusahaan dalam hubungannya dengan penentuan fasilitas PPN yang akan dipakai perusahaan apakah melalui Restitusi atau memanfaatkan SKB PPN sehingga PPN dibebaskan pada saat perolehan aktiva.



Seperti dibahas pada BAB II dalam skripsi ini, Secara sederhana salah satu fungsi kas adalah fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu relatif singkat tanpa ada pengurangan investasi awal.

2. Likuiditas Fasilitas PPN dan Profitabilitas Perusahaan

Dua hal yang penting dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan yaitu Likuiditas dan Profitabilitas harus benar – benar diperhatikan karena Likuiditas yang tinggi merupakan indikator bahwa risiko perusahaan rendah artinya perusahaan aman dari kemungkinan kegagalan membayar berbagai kewajiban lancar. Namun, hal itu harus dicapai dengan merelakan rendahnya tingkat Profitabilitas, yang akan berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan Perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan menginginkan Profitabilitas yang tinggi, Perusahaan harus bersedia menghadapi risiko rendahnya Likuiditas atau risiko yang kian meningkat atas kegagalan membayar kewajiban jangka pendek (yang bisa menyebabkan kebangkrutan usaha).

Seperti dijelaskan pada BAB IV bahwa Karena harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar, termasuk dalam harga perolehan harta adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan harta tersebut seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan pemasangan maka dalam perolehan aset tetap, PPN yang dibayarkan tidak akan mempengaruhi Laporan Laba Rugi tahun berjalan sehingga tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh sebab itu dengan atau tanpa pembayaran PPN, Profitabilitas perusahaan tidak terpengaruh akan tetap bernilai -8,89%. Prosentase minus diakibatkan oleh Laporan tahun berjalan PT. Temas Line melaporkan kerugian sebesar Rp. 114.457.408.508,-

Secara logis dapat dijelaskan tidak ada pengaruh antara hubungan antara likuiditas fasilitas PPN dengan Profitabilitas. Untuk membuktikannya dapat kita lihat dengan uji Beda sebagai berikut :

Tabel 5.1 Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Likuiditas & Profitabilitas	2	.	.

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Likuiditas – Profitabilitas	55.89000	1.41421	1.00000	43.18380	68.59620	55.890	1	.011

Dari tabel SPSS diatas dapat dilihat Thitung 55,890 lebih besar dari T-table yaitu 6,314 maka $H_0 > H_a$ sehingga H_0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB terhadap Profitabilitas di PT. Pelayaran Temas line, Tbk. Jika dilihat dari tabel *Paired Sample Correlations* diatas, likuiditas fasilitas tidak memiliki korelasi terhadap profitabilitas (Korelasi bernilai 0) dan



signifikansinya 0. Artinya bahwa tidak ada hubungan antara likuiditas terhadap profitabilitas atas pemanfaatan pembebasan PPN baik dengan menggunakan metode SKB PPN maupun dengan menggunakan metode Restitusi.

Pembahasan

1. Likuiditas Fasilitas PPN terhadap Profitabilitas Perusahaan

Seperti dibahas diatas bahwa PPN yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva tetap menjadi harga perolehan aktiva itu sendiri maka pembayaran PPN atas kepemilikan aktiva tetap kapal tidak akan mempengaruhi Laba Rugi perusahaan pada tahun berjalan sehingga profitabilitas tidak akan terganggu dengan adanya pembayaran PPN atas kepemilikan aktiva tetap Kapal.

Akan tetapi, likuiditas perusahaan akan terganggu dengan adanya pembayaran PPN atas kepemilikan Kapal dimana likuiditas perusahaan menurun pada PT. Tempuran Emas Tbk dari 0,48 tanpa pembayaran PPN menjadi 0,46 jika perusahaan membayarkan PPN atas kepemilikan Kapal dan dinyatakan signifikan secara statistik melalui Uji Beda dengan program analisis SPSS.

Dalam hubungannya likuiditas terhadap profitabilitas dimana likuiditas bertujuan untuk memelihara aktiva lancar yang cukup besar (biasanya memiliki daya menghasilkan rendah) bertentangan dengan kegiatan usaha untuk memaksimalkan profitabilitas. Akan tetapi pada analisis likuiditas fasilitas PPN pada PT. Tempuran Emas, Tbk tidak terdapat hubungan maupun pengaruh signifikan antara pemilihan fasilitas PPN dengan Profitabilitas perusahaan.

2. Penentuan Metode Fasilitas PPN

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas penelitian ini maka metode fasilitas pembebasan PPN penting untuk dimanfaatkan dalam rangka menjaga kas dan setara kas yang pada akhirnya akan menentukan besar kecilnya likuiditas perusahaan tanpa harus mengkhawatirkan Profitabilitas yang mungkin akan terpengaruh karena asas *trade off* antara Likuiditas dan profitabilitas seperti dikemukakan pada teori – teori sebelumnya. Namun secara terpisah, pembayaran PPN atau pembebasan PPN tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan seperti terlihat pada pembahasan diatas dimana saat diuji hubungan antara likuiditas fasilitas PPN dengan profitabilitas hasilnya korelasi keduanya 0 atau tidak berkorelasi dan signifikansinya 0.

Pada saat perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan pembebasan PPN dengan menggunakan SKB PPN maka perusahaan harus memperhatikan Undang-undang atas PPN dan PPN BM pada Perusahaan Pelayaran.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Arus kas tidak berbeda secara signifikan pada saat Perusahaan membayar PPN dan pada saat perusahaan tidak membayar PPN sedangkan Likuiditas fasilitas PPN berbeda secara signifikan maka dapat disimpulkan hasil uji statistik atas perbedaan kas tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diduga karena :



- =====
- a. Data yang digunakan tidak memenuhi kriteria karena laporan yang digunakan hanya laporan yang berakhir Tahun 2010, hal ini diakibatkan Laporan yang berakhir pada Tahun 2009 dan sebelum Tahun 2009 tidak dapat diterapkan terhadap Undang-undang PPN terbaru yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang baru efektif digunakan Tahun 2010.
 - b. Kemungkinan data pada Perusahaan tidak benar atau pelaporannya tidak sesuai dengan teori yang berlaku.
2. Jika dilihat dari laporan arus kas PT. Tempuran emas Tbk yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 pada tabel 4.1 dan prognosa Laporan arus kas PT. Tempuran Emas Tbk yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 pada tabel 4.2 maka dapat diketahui perbedaan arus kas saat perusahaan memilih memanfaatkan SKB PPN, kas dan setara kas perusahaan sejumlah Rp. 7.019.313.499,- akan tetapi saat perusahaan memilih menggunakan fasilitas restitusi dan membayarkan PPN pada saat perolehan aktiva tetap Kapal senilai Rp. 6.906.570.010,- maka kas dan setara kas perusahaan menurun menjadi Rp. 112.743.489. Dengan demikian, likuiditas perusahaan dalam jangka pendek menjadi terganggu meskipun tidak signifikan secara statistik akibat adanya beban PPN yang harus dibayar sehingga daya saing perusahaan dari segi keuangan menurun.
- Pengenaan PPN pada pengadaan kapal laut mempengaruhi arus kas pada periode berikutnya dikarenakan defisit yang dialami pada saat perolehan aktiva kapal dimana Pengusaha harus membayarsejumlah uang muka perolehan kapal sekaligus membayar beban PPN pada periode yang sama.
3. Dari Neraca PT. Tempuran Emas, Tbk yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dimana Perusahaan tidak membayar PPN atas perolehan Aktiva Kapal diketahui likuiditasnya adalah 48% atau 0,48. Setelah dibuat Prognosa Neraca yang berakhir Tanggal 31 Desember 2010 dengan memasukkan pembayaran PPN atas perolehanaktiva Kapal maka seperti terlihat pada tabel 4.6 likuiditasnya berubah menjadi 46% atau 0,46.
- Dari hasil uji beda menggunakan SPSS seperti tampak pada tabel 4.7 dan 4.8 dapat diketahui signifikansi likuiditas atas pemanfaatan kedua fasilitas PPN adalah 0.014 dengan Confidence level 0,05 maka dapat diartikan bahwa $H_0 < H_a$ maka H_0 ditolak. Artinya bahwa perbedaan antara likuiditas dari kedua metode fasilitas adalah signifikan.
4. Dengan adanya fasilitas pembebasan PPN untuk Perusahaan Pelayaran dengan syarat yang relatif mudah dan pengaruh terhadap arus kas keluar perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi Likuiditas Perusahaan seperti pada kesimpulan nomor tiga diatas maka sebaiknya Temas Linemenyikapi dengan bijak fasilitas tersebut dengan cara memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN sehingga beban kas keluar pada tahun berjalan saat perolehan aktiva tidak perlu dikeluarkan kas untuk pembayaran PPN sebagaimana yang telah dilakukan oleh Temas Line pada Perolehan Kapal Tahun 2010.

Saran

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap laporan arus kas dapat diketahui likuiditas berbeda secara signifikan, dan perlu diingat dalam jangka pendek arus kas sangat terpengaruh dengan adanya pembayaran PPN tersebutmaka penulis menyarankan agar tetap memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN meskipun dalam jangkapanjang PPN tersebut dapat dikompensasi maupun direstitusi. Namun, perlu dipertimbangkan likuiditas



perusahaan dalam menjaga kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

2. Mengingat pentingnya Likuiditas dalam menjaga perusahaan agar tetap berada pada posisi aman dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga risiko kebangkrutan dapat diminimalisir maka perlu kiranya menjaga likuiditas perusahaan dengan memilih fasilitas pembebasan dengan menggunakan SKB PPN terlebih lagi tidak ada risiko *trade off* antara likuiditas dengan profitabilitas seperti yang telah diuji pada laporan keuangan PT. Tempuran Emas Tbk.
3. Pada Peneliti selanjutnya, diharapkan :
 - a. Agar diperhatikan indikator lain dari rasio keuangan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap Profitabilitas dan performa Perusahaan secara lebih mendalam.
 - b. Membuat perbandingan minimal dengan 2 tahun laporan keuangan agar dapat diketahui apakah pendugaan penulis atas kas yang tidak signifikan benar akibat data yang tidak memenuhi kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

- Keown J., Arthur, et. al., 2002, *Manajemen Keuangan Jilid 1*. Jakarta : Indeks.
- Robbins P., Stephen & Mary Coulter, 2002, *Manajemen jilid 2*. Jakarta : Indeks.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Gramedia.
- Riduwan, 2004, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ir. Kuswandi, MBA, 2007, *Memahami Rasio – Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Mardiyanto, Handono, 2009, *Intisari manajemen keuangan*. Jakarta : Grasindo.
- Arifin, Johar, 2009, *Akuntansi Pajak Dengan Microsoft Excel*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Oei, M.M, M.Kom, Istijanto, 2010, *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia.
- IAI, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Tularji, 2004. *Pungutan Pajak Bisa Gagal Cabotage*, Bisnis Indonesia. Jumat, 12 Maret 2010.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_keuangan
- <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=770>
- <http://insa.or.id/faq.php>
- www.ortax.org
- www.pajak.go.id